

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menempati posisi ke-4 di dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar setelah Tiongkok, India, dan Amerika.¹ Bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, penduduk Indonesia jauh unggul dari segi kuantitas namun jika dilihat dari segi kualitas Indonesia masih kalah jauh dan belum bisa bersaing. Hal ini dilihat dari salah satu indikator kualitas sumberdaya manusia yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia bercokol di peringkat 113 dari 188 negara. IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf dan pendidikan untuk semua negara seluruh dunia. Indeks Pembangunan Manusia dalam suatu negara dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pembangunan pendidikan dan tingkat kemiskinan.²

Pembangunan pendidikan menempati peran sangat strategis dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam mencapai hal tersebut dapat dicapai apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang unggul yang memiliki kesehatan dan status gizi yang baik. Masalah kurang gizi merupakan salah satu persoalan kesehatan yang masih perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya hal ini perlu dilakukan sejak manusia masih pada usia masa kanak-kanak, hal ini juga sangat

¹Detik Finance. 2015, 06 Maret. *Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, RI Masuk 4 Besar (Online)* (<http://www.finance.detik.com>), diakses 27 November 2017.

² Kompasiana. 2017, 15 November. *UNDP 2016, Posisi Indeks Pembangunan Indonesia 113 dari 188 Negara (Online)* (<http://www.kompasiana.com>), diakses 27 November 2017.

perlu diperhatikan terhadap usia anak sekolah, mengingat di Indonesia anak usia sekolah masih sangat rentan membeli jajanan yang tidak sehat yang tentunya tidak memenuhi gizi seimbang yang mereka butuhkan.

Berdasarkan penelitian tentang permasalahan anak usia sekolah dasar (umur 7-12 tahun) yang berdomisili di pinggiran kota adalah masih rendahnya tingkat kesehatan dan keadaan gizi, dan hal ini berdampak pada semangat dan prestasi belajar murid.³ Status gizi anak secara tidak langsung berkaitan dengan faktor sosial ekonomi keluarga. Jika status sosial ekonomi rendah maka kebutuhan makanan keluarga akan kurang terpenuhi sehingga anak akan memiliki status gizi kurang.⁴ Kemiskinan menjadi hal yang patut diperhatikan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kemiskinan membuat sebagian keluarga Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi seimbang yang mereka butuhkan yang menyebabkan anak-anak pada kondisi keluarga miskin tidak memiliki kualitas kesehatan yang baik yang akan berdampak pada kecerdasan otak mereka.

Dalam menanggapi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesehatan sekaligus meningkatkan ketahanan fisik anak usia sekolah dan agar dapat mendorong minat serta kemampuan belajar murid adalah melalui kegiatan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah yang selanjutnya disingkat dengan PMT-AS. Program ini merupakan salah satu bagian dari program prioritas pemerintah Indonesia

³Laporan Pelaksanaan Program PMT-AS di Kota Padang Tahun 2014

⁴Fadil Oenzil. 2014. Hubungan Status Gizi dengan Status Sosial Ekonomi Keluarga Murid Sekolah Dasar di Daerah Pusat dan Daerah Pinggiran di Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*. Volume 3 Nomor 2.

dalam dunia pendidikan yang terfokus pada perbaikan status gizi anak sekolah dikeluarga miskin dimana hal ini dijelaskan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang ‘‘Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional’’ Pemerintah telah memasukkan prioritas tersebut sebagai salah satu program perbaikan gizi siswa TK/RA dan SD/MI melalui kegiatan PMT-AS bagi siswa TK/RA dan SD/MI yang dilaksanakan terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan.⁵

Program PMT-AS ini dilaksanakan secara lintas sektoral dengan melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga terkait. Tujuan umum PMT-AS bagi siswa TK/RA dan SD/MI adalah untuk meningkatkan kecukupan gizi dan ketahanan fisik siswa sehingga dapat mendorong minat dan kemampuan belajar siswa untuk meningkatkan prestasi belajar dalam rangka menunjang Program Wajib Belajar. Adapun tujuan khusus Program PMT-AS bagi Siswa TK/RA dan SD/MI adalah :⁶

- a. Meningkatkan kecukupan asupan gizi peserta didik melalui makanan tambahan;
- b. Meningkatkan ketahanan fisik dan kehadiran peserta didik dalam mengikuti kegiatan belajar;
- c. Meningkatkan kesehatan anak khususnya dalam penanggulangan penyakit kecacingan;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan perilaku peserta didik untuk menyukai makanan lokal bergizi, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS);
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan pengadaan pangan lokal; dan
- f. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan gizi peserta didik, produksi pertanian, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

⁵Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan

⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pedoman penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur Sumatera Barat dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 411.41057/BPM-2013 Perihal Pelaksanaan Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS). Dalam surat ini dijelaskan bahwa tujuan dari program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) adalah untuk memperbaiki asupan gizi peserta didik TK/RA dan SD/MI melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan minat, kemampuan belajar, ketahanan fisik, serta prestasi sehingga menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Selain itu, Gubernur Sumatera Barat menyampaikan agar Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dapat memprogramkan kegiatan PMTAS ini dengan mengalokasikan dana melalui APBD masing-masing untuk mendukung terlaksananya kegiatan PMTAS.⁷

Berikut ini dapat dilihat pada tabel 1.1 kondisi Kab/Kota yang memiliki anggaran dan yang tidak memiliki anggaran dalam pelaksanaan PMT-AS di Sumatera Barat.

⁷Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 411.4/057/BPM-2013 Perihal Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS)

Tabel 1.1

Kab/ Kota Pelaksana Program PMT-AS di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2017

NO.	KAB/KOTA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KABUPATEN									
1.	Pesisir Selatan	•	•	•	•	•	•	•	•
2.	Solok	-	•	•	•	•	•	•	•
3.	Tanah Datar	•	-	-	•	•	•	•	•
4.	Padang Pariaman	•	-	-	-	-	-	-	-
5.	Agam	•	-	-	-	-	-	-	-
6.	Lima Puluh Kota	-	-	-	•	•	•	•	•
7.	Pasaman	•	•	•	•	•	•	•	•
8.	Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pasaman Barat	•	-	-	-	-	-	-	-
10.	Dharmasraya	-	-	-	-	•	•	•	•
11.	Sijunjung	•	•	•	•	•	•	•	•
12.	Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-	-	-	-
KOTA									
13.	Solok	•	•	•	•	•	•	•	•
14.	Sawah Lunto	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Payakumbuh	•	•	•	•	•	•	•	•
16.	Pariaman	•	•	•	•	•	•	•	•
17.	Padang Panjang	•	•	-	-	-	-	-	-
18.	Bukittinggi	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Padang	•	•	•	•	•	•	•	•

• Ada anggaran untuk PMT-AS

- Tidak ada anggaran untuk PMT-AS

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dijelaskan bahwa dari 19 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat tidak semua dari Kab/Kota yang menjalankan program PMT-AS ini, ada beberapa Kab/Kota yang melakukan hanya dalam beberapa tahun dan kemudian berhenti menyelenggarakan program ini karena tidak memiliki anggaran, dengan arti kata bahwa dalam APBD yang ada tidak dianggarkan untuk program ini. Salah satu Kota yang masih menyelenggarakan kegiatan PMT-AS adalah Kota Padang. Penyelenggaraan PMT-AS di Kota Padang masih dilakukan pemerintah sampai tahun 2017.

Peneliti memilih Kota Padang sebagai lokus pada penelitian ini karena melihat data tentang kemiskinan di Sumatera Barat ternyata Padang merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Sumatera Barat.

Berikut ini dapat dilihat pada tabel 1.2 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Barat (Dalam Ribu Jiwa) dari Tahun 2011-2016

No	Kab/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Kep. Mentawai	13.4	13.3	12.58	13.16	13.09	13.09
2	Pesisir Selatan	42.4	38.2	38.3	35.02	38.13	35.86
3	Kab. Solok	39.5	35.7	36.9	34.48	36.42	34.06
4	Sijunjung	20.3	18.6	18.4	17	17.52	17.12
5	Tanah Datar	22.6	20.4	19.8	18.22	20.05	19.63
6	Padang Pariaman	44.6	40.4	36.8	33.92	35.87	36.34
7	Agam	43.3	39.3	36.1	33.28	36.06	37.55
8	50 Kota	35.2	31.9	30	27.42	28.76	28.57
9	Pasaman	26.8	24.3	22.2	20.33	21.88	20.83
10	Solok Selatan	15.5	14.2	12.6	11.56	11.95	11.91
11	Dharmasraya	19.6	18.2	16.4	15.22	15.89	16.24
12	Pasaman Barat	33.8	31.1	31.1	28.59	32.34	30.76
13	Padang	50.9	45.9	44.2	40.7	44.43	42.56
14	Kota Solok	4	3.7	2.9	2.71	2.72	2.59
15	Sawahlunto	1.4	1.3	1.4	1.34	1.34	1.34
16	Padang Panjang	3.5	3.2	3.3	3.23	3.44	3.47
17	Bukittinggi	7.3	6.7	6.4	6	6.54	6.81
18	Payakumbuh	12	11	9.7	8.85	8.51	8.35
19	Pariaman	4.5	4.1	4.4	4.3	4.58	4.47
Jumlah Prov. Sumatera Barat		441.8	401.5	384.1	354.74	379.6	371.55

Jumlah Penduduk Miskin Tertinggi

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dari tahun 2010-2016 Kota Padang menempati urutan pertama sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Sumatera Barat. Seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan membuat kebutuhan makanan keluarga kurang terpenuhi yang dapat menyebabkan anak-

anak pada lingkungan keluarga miskin memiliki status gizi yang kurang baik yang akan berdampak pada kecerdasan otak anak.

Status gizi yang kurang baik pada anak juga dapat dilihat dari persentase anak-anak penderita stunting. Stunting merupakan kondisi yang merujuk pada tubuh pendek di bawah usia rata-rata karena anak kurang gizi. Stunting juga sangat erat kaitannya dengan kemiskinan karena keluarga miskin akan sulit mencukupi kebutuhan konsumsi pangan yang bergizi. Kekurangan gizi pada usia sekolah akan mengakibatkan anak menjadi lemah, cepat lelah dan mudah sakit. Oleh karena itu anak-anak seringkali absen serta mengalami kesulitan dalam mengikuti dan memahami pelajaran. Dalam keadaan seperti itu sulit mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, aktif, kreatif dan produktif yang mampu berkiprah dan bersaing pada era globalisasi.⁸

Di Kota Padang pada tahun 2017 permasalahan stunting presentasinya berada pada angka 22,6%. Angka ini cukup tinggi mengingat persentase stunting maksimal yang ditoleransi oleh WHO yaitu sebesar 20% atau seperlima dari jumlah anak. Cara yang harus dilakukan dalam mendeteksi kasus stunting yaitu dengan cara pengukuran berat dan tinggi badan anak.⁹

Dalam pelaksanaan program PMT-AS di Kota Padang, salah satu tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan PMT-AS adalah dengan bertambahnya tinggi badan dan berat badan anak. Tinggi badan dan berat badan tersebut dicatatkan kedalam buku catatan khusus yang disebut dengan kartu menuju sehat (KMS)

⁸Delmi Sulastri. 2012. Faktor Determinan Kejadian Stunting Pada Anak Usia Sekolah di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang. *Artikel Penelitian Majalah Kedokteran Andalas*. Volume 36 Nomor 2.

⁹Harian Haluan. 2018. 23 Maret. Padang Belum Bebas Stunting. (*Online*) (<http://www.harianhaluan.com>) diakses tanggal 23 maret 2018.

yang dimiliki oleh masing-masing anak di sekolah sasaran pelaksanaan PMT-AS di Kota Padang. Dan berdasarkan hal tersebut Padang sebagai kota dengan jumlah penduduk miskin tertinggi dan dengan persentase kasus stunting yang tinggi tentunya pelaksanaan program PMT-AS akan sangat bermanfaat jika diselenggarakan dengan baik di Kota Padang karena program PMT-AS hadir dengan tujuan umum untuk meningkatkan ketahanan fisik anak dengan memperbaiki gizi anak melalui pemberian makan tambahan .

Kemudian alasan lain peneliti memilih Kota Padang sebagai lokus penelitian adalah karena angka kasus kejadian penyakit kecacingan berdasarkan Profil Dinas Kesehatan Kota Padang dalam Skripsi Cynthia Agustini dari tahun 2012 sampai 2015 masih banyak. Pada tabel 1.3 berikut ini peneliti lampirkan data jumlah kasus kejadian penyakit kecacingan di Kota Padang :

**Tabel 1.3
Jumlah kasus kejadian penyakit kecacingan di Kota Padang**

Tahun	2012	2013	2014	2015
Jumlah Kasus	533	1331	1250	776

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2016

Jumlah penderita pada tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015 ditemukan sebanyak 533, 1331, 1250, dan 776 kasus.¹⁰ Padahal salah satu tujuan dari Program PMT-AS menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 adalah untuk meningkatkan kesehatan anak khususnya dalam penanggulangan penyakit kecacingan.

¹⁰Cynthia Agustini. 2016 *Hubungan antara Personal Hygiene dengan Gambaran Telur Soil Transmitted Helminths pada Kuku Jari Tangan Siswa SDN 27 Anak Air, Koto Tangah, Padang*. Skripsi. Padang: Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Program PMT-AS ini dalam pelaksanaannya merupakan program terpadu yang melibatkan banyak sektor pemerintahan, pelaksanaan kegiatan PMTAS ini juga dilakukan bertingkat yaitu oleh tingkat kota, kecamatan, kelurahan dan sekolah, dimana dalam pelaksanaannya dibentuk panitia pelaksana kegiatan tingkat kota, penitia pelaksana tingkat kecamatan, penitia pelaksana tingkat kelurahan dan penitia pelaksana tingkat sekolah yang juga dibantu oleh masyarakat sekitar daerah sasaran PMT-AS.

Dalam penetapan sekolah sasaran pelaksana PMT-AS yaitu dilakukan secara keseluruhan kepada siswa di sekolah tanpa ada pilih kasih, maksudnya ketika sekolah sudah ditetapkan sebagai sekolah sasaran pelaksana PMTAS artinya semua murid di sekolah tersebut berhak mendapatkan makanan tambahan seperti yang telah ditentukan

Dalam pelaksanaan program PMT-AS di Kota Padang, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan kegiatan PMT-AS di Kota Padang, DP3AP2KB merupakan dinas yang berperan sebagai pengguna anggaran dalam kegiatan PMT-AS yang berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan PMT-AS di Kota Padang. Dalam pelaksanaan kegiatan PMT-AS ini dibentuk panitia pelaksana dari berbagai pihak yang dianggap memiliki kompetensi dalam pelaksanaan PMT-AS agar dapat mencapai tujuan.

Panitia pelaksana tingkat kota tahun 2017 dibentuk berdasarkan SK Kepala DP3AP2PKB Kota Padang No 40 Tahun 2017. Berikut pada tabel 1.4 Panitia Pelaksana Kegiatan PMT-AS di Kota Padang tahun 2017:¹¹

Tabel 1.4

Panitia Pelaksana Kegiatan PMT-AS Kota Padang Tahun 2017

NO	NAMA/ JABATAN/ UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPEGANITIAAN
1	Wakil Walikota Kota Padang	Ketua Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Anggota Pengarah
3	Kepala DP3AP2KB Kota Padang	Pengguna Anggaran
4	Kabid Pemenuhan Hak Anak	PPTK
5	Kasi Kesehatan Dasar DP3AP2KB Kota Padang	Koordinator Teknis
6	Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota Tim Teknis
7	Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota Tim Teknis
8	Dinas Pangan Kota Padang	Anggota Tim Teknis
9	Kemenag Kota Padang	Anggota Tim Teknis
10	PKK Kota Padang	Anggota Tim Teknis
11	Kasi Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif& Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya DP3AP2KB Kota Padang	Sekretaris
12	Kasi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi DP3AP2KB Kota Padang	Sekretariat
13	Fabian (Staf)	Sekretariat
14	Zulkarnaen	Sekretariat
15	Devita Helena	Sekretariat
16	Tisnawati	Sekretariat

Sumber : SK Kepala DP3AP2KB Kota Padang No 43 Tahun 2017

Di dalam anggota kepanitian PMT-AS pada tabel 1.4 ada berbagai sektor pemerintahan yang memiliki kedudukan sebagai tim teknis yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pangan, Kemenag dan PKK Kota Padang. Masing-masing anggota tim teknis ini memiliki peran yang berbeda-beda namun memiliki satu tujuan yang sama yaitu menyusun rencana, menetapkan kebijaksanaan dan melakukan koordinasi dengan anggota tim teknis lainnya

¹¹SK Kepala DP3P2KB Kota Padang No 40 Tahun 2017

dalam pelaksanaan PMT-AS di Kota Padang sehingga PMT-AS dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Kegiatan persiapan program PMT-AS pada tingkat kota dimulai dengan dibentuknya panitia pelaksana kegiatan yang disahkan dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala DP3AP2KB tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan PMT-AS, selanjutnya penitia pelaksana kegiatan menetapkan sekolah sasaran sebagai penerima program, dilanjutkan dengan pendataan jumlah murid yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, pendataan dilakukan dua kali setiap tahunnya, pendataan pertama bertujuan untuk mengetahui jumlah murid guna menyusun anggaran sementara pendataan kedua dilakukan sebagai dasar dalam penyaluran dana masing-masing sekolah. Hal ini dilanjuti dengan dikeluarkannya surat keputusan Walikota Padang sebagai pengukuhan sekolah sasaran pelaksanaan kegiatan program PMT-AS.

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyusunan buku pedoman teknis yang bertujuan untuk memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan PMT-AS baik untuk penitia pelaksana kegiatan di kecamatan dan kelurahan maupun penitia pelaksana kegiatan di sekolah, setelah itu penitia pelaksana kegiatan tingkat kota menyurati camat agar memerintahkan lurah untuk membentuk surat keputusan tim pelaksana kelurahan, penitia pelaksana kegiatan tingkat kota juga memerintah kepada sekolah agar membentuk penitia pelaksana kegiatan PMT-AS di sekolah yang kemudian juga dikukuhkan melalui surat keputusan kepala sekolah yang diketahui oleh camat dan lurah.

Selanjutnya kegiatan pokok dalam pelaksanaan PMT-AS di Kota Padang dimulai dengan penitia pelaksana kegiatan menetapkan Hari Makan Anak (HMA). HMA merupakan jumlah hari pada kudapan yang diterima anak dan dihitung dalam jangka setahun, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pembinaan kepada sekolah sasaran yang dilakukan secara terpadu dan mandiri (masing-masing tim koordinasi melakukan pembinaan dibantu oleh Dinas/UPTD/Dinas Ranting Kecamatan sesuai dengan tupoksinya ke sekolah-sekolah). Sebagai dasar pengambilan kebijakan dilakukan rapat koordinasi dan evaluasi tim koordinasi Kota Padang yang kemudian dilanjutkan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pada tingkat kecamatan kegiatan persiapan pelaksanaan PMT-AS dimulai dengan membentuk penitia pelaksana kegiatan pada tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri Camat, Aparat Kecamatan, UPTD/PPL Pertanian, UPTD Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan dan Tenaga Gizi Puskesmas, Departemen Agama/KUA yang dikukuhkan dengan surat keputusan camat. Kemudian camat menurunkan kepada lurah agar dapat membentuk penitia pelaksana kegiatan tingkat kelurahan yang dikukuhkan dengan surat keputusan lurah. Hal ini juga merupakan bagian dari persyaratan saat pengajuan pengambilan dana untuk kegiatan pelaksanaan program. Kegiatan pokok pada tingkat kecamatan juga dimulai dengan rapat koordinasi, pembinaaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat kecamatan.

Pada tingkat kelurahan kegiatan persiapan pelaksanaan PMT-AS dimulai dengan membentuk tim pelaksana tingkat kelurahan yang anggotanya terdiri dari

Lurah, Ketua TP.PKK Kelurahan, Petugas Gizi Kelurahan yang kemudian dikukuhkan dengan surat keputusan lurah. Selanjutnya lurah menurunkan surat kepada sekolah agar dapat membentuk tim pelaksana di sekolah yang anggotanya terdiri dari Kepala Sekolah, Guru, Komite Sekolah, Petugas Masak yang kemudian dikukuhkan dengan surat keputusan kepala sekolah.

Selanjutnya pada tingkat sekolah kegiatan PMT-AS dimulai dengan mengadakan rapat anggota panitia pelaksana kegiatan di tingkat sekolah untuk membicarakan tentang pelaksanaan PMT-AS di tingkat sekolah dan mengimbau masyarakat agar menggali potensi untuk mendukung program PMT-AS.

Untuk kegiatan pokok pelaksanaan PMT-AS di tingkat kelurahan dan sekolah sebagai tim pelaksana dimulai dengan penyusunan menu, menu disusun sesuai juknis yang telah diturunkan oleh penyuluhan gizi pukesmas bersama dengan petugas masak, PKK kelurahan dan guru. Kemudian dilakukan pencairan dana dengan rangkaian kegiatan kepala sekolah mengajukan pengurusan pencairan dana kepada DP3AP2KB Kota Padang selaku dinas yang berfungsi sebagai pemegang anggaran PMT-AS Kota Padang, setelah dana diterima dilakukan kegiatan pengukuran berat badan, tinggi badan , kartu menuju sehat (KMS), dan pemberian obat cacing untuk mengetahui perkembangan status kesehatan anak sebelum dan sesudah diberi makanan kudapan sehat, yang dilakukan oleh guru didampingi oleh tenaga gizi puskesmas. Kemudian pemberian makanan kudapan dilakukan oleh guru pada 10 menit sebelum istirahat pertama sebelum memberikannya pada siswa guru harus menjelaskan tentang isi dan kandungan

dari kudapan yang diberikan kepada siswa dan mengajarkan nilai-nilai agama dan tata cara saat makan.

Berikut peneliti tampilkan tabel 1.5 tentang peran masing-masing anggota panitia yang terlibat dalam pelaksanaan Program PMT-AS di Kota Padang:

**Tabel 1.5
Tupoksi Panitia Pelaksana Program PMT-AS di Kota Padang**

Panitia Pelaksana Tingkat Kota			
No	OPD	Kedudukan Dalam Kepanitian	Peran
1	Dinas P3AP2KB Kota Padang	Pengguna Anggaran	<i>Coordinator, leading sector</i>
2	Dinas Kesehatan Kota Padang	Anggota Tim Teknis	Menyusun rencana dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan nilai gizi yang dikandung dalam makanan kudapan, terkait kesedian obat cacing dan pemantauan terhadap perkembangan tumbuh kembang anak.
3	Dinas Pendidikan Kota Padang	Anggota Tim Teknis	Menyusun rencana dan menetapkan kebijakan terkait kriteria penetapan sekolah sasaran pelaksana PMT-AS
4	Dinas Pangan Kota Padang	Anggota Tim Teknis	Menyusun rencana dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan cocok tanam, pembinaan kebun sekolah dan penyediaan bibit untuk bahan pangan dalam pembuatan makanan kudapan PMT-AS
5	PKK Kota Padang	Anggota Tim Teknis	Menyusun rencana dan menetapkan kebijakan yang berkait dengan tata cara dalam memasak, pemberdayaan ibu PKK kelurahan dan pemberian instruksi dalam pelaksanaan cipta menu khas daerah setempat.
6	Kemenag Kota Padang	Anggota Tim Teknis	Menyusun rencana dan menetapkan kebijakan yang berkaitan tentang pembinaan mental dan spiritual anak.

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Panitia Pelaksana PMT-AS Tingkat Kecamatan

No	Jabatan Kedinasan	Kedudukan Dalam Kepanitian	Peran
1	Camat	Ketua	<i>Coordinator</i>
2	UPTD Diknas Kecamatan	Anggota	Melakukan pendataan sekolah dan mengumpulkan laporan yang ada di lingkungan kecamatan
3	UPTD/PPL Pertanian	Anggota	Melaksanakan pembinaan kebun sekolah dan menyediakan bibit yang dapat ditanam serta memberikan penyuluhan tentang manfaat berbagai macam bahan pangan yang ada dalam makanan kudapan
4	Tenaga Gizi Puskesmas	Anggota	Memantau penyediaan obat cacing, memantau sanitasi/higienitas tempat sarana petugas masak, memantau nilai gizi secara periodik dan memberikan bimbingan kepada petugas masak
5	KUA	Anggota	Membina tata tertib anak, pembinaan norma sopan santun anak dan mengajarkan anak dalam bersyukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa

Panitia Pelaksana PMT-AS Tingkat Kelurahan

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepanitian	Peran
1	Lurah	Ketua	Menentukan kader pemasak makanan kudapan bersama ketua TP.PKK kelurahan dan kepala sekolah, menyediakan lahan untuk kebun sekolah, memberikan penyuluhan kepada orang tua dan masyarakat tentang program PMT-AS
2	TP.PKK	Anggota	Menyusun menu dan jenis makanan kudapan, menentukan bentuk dan bahan bersama kepala sekolah, komite dan tenaga gizi puskesmas, menyusun jadwal petugas masak, menggali potensi dan swadaya masyarakat.

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

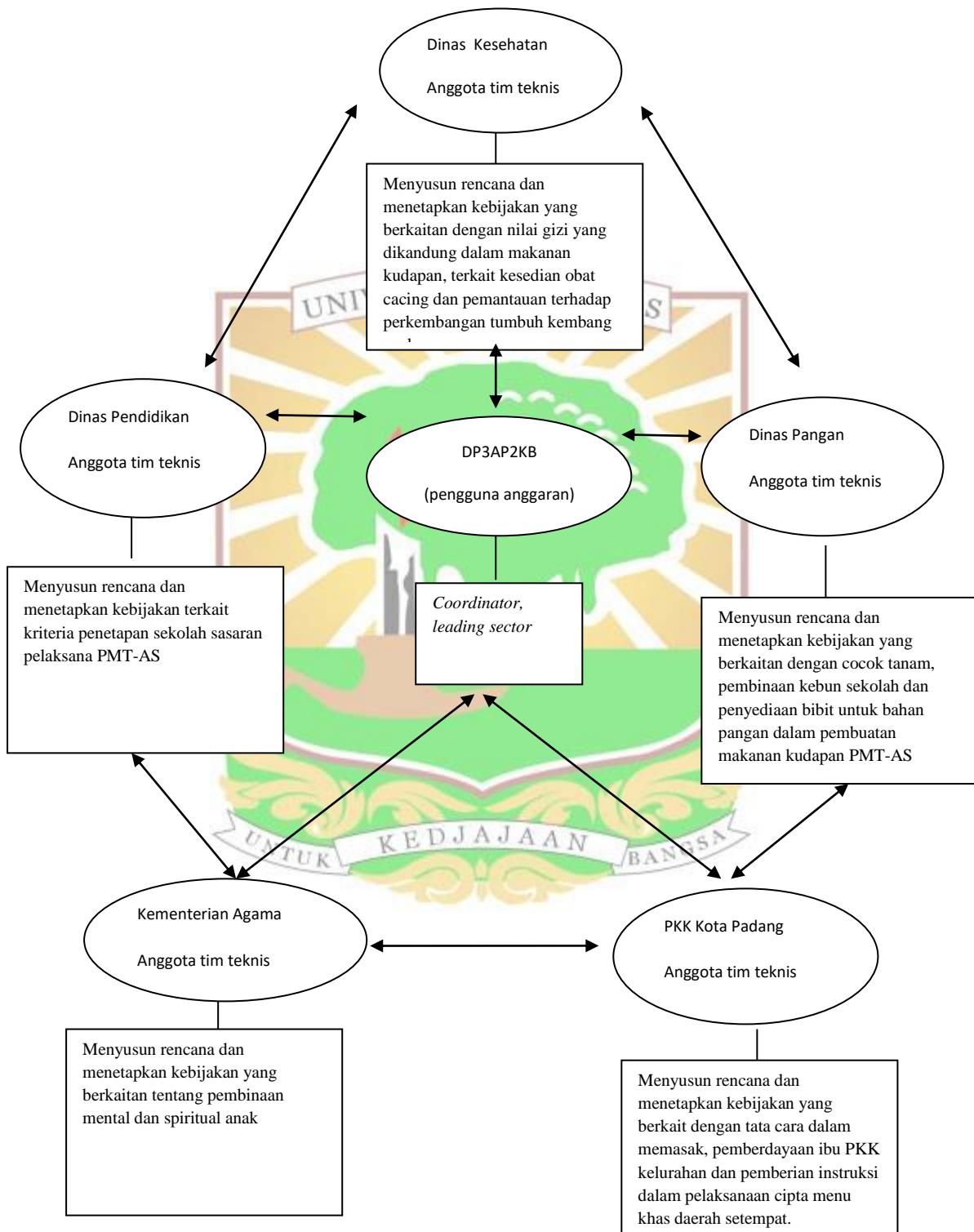
Panitia Pelaksana PMT-AS Tingkat Sekolah

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Kepanitian	Peran
1	Kepala Sekolah	Ketua	<i>Coordinator</i> , sebagai pemegang anggaran untuk pengadaan bahan makanan kudapan
2	Guru	Anggota	Yang terlibat dalam pemberian makanan kudapan secara langsung kepada anak.
3	Komite	Anggota	Sebagai pembantu dalam mencari donatur agar dapat menciptakan pelaksanaan PMT-AS secara mandiri
4	Petugas Masak	Anggota	Memasak makanan kudapan yang akan diberikan kepada siswa

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018



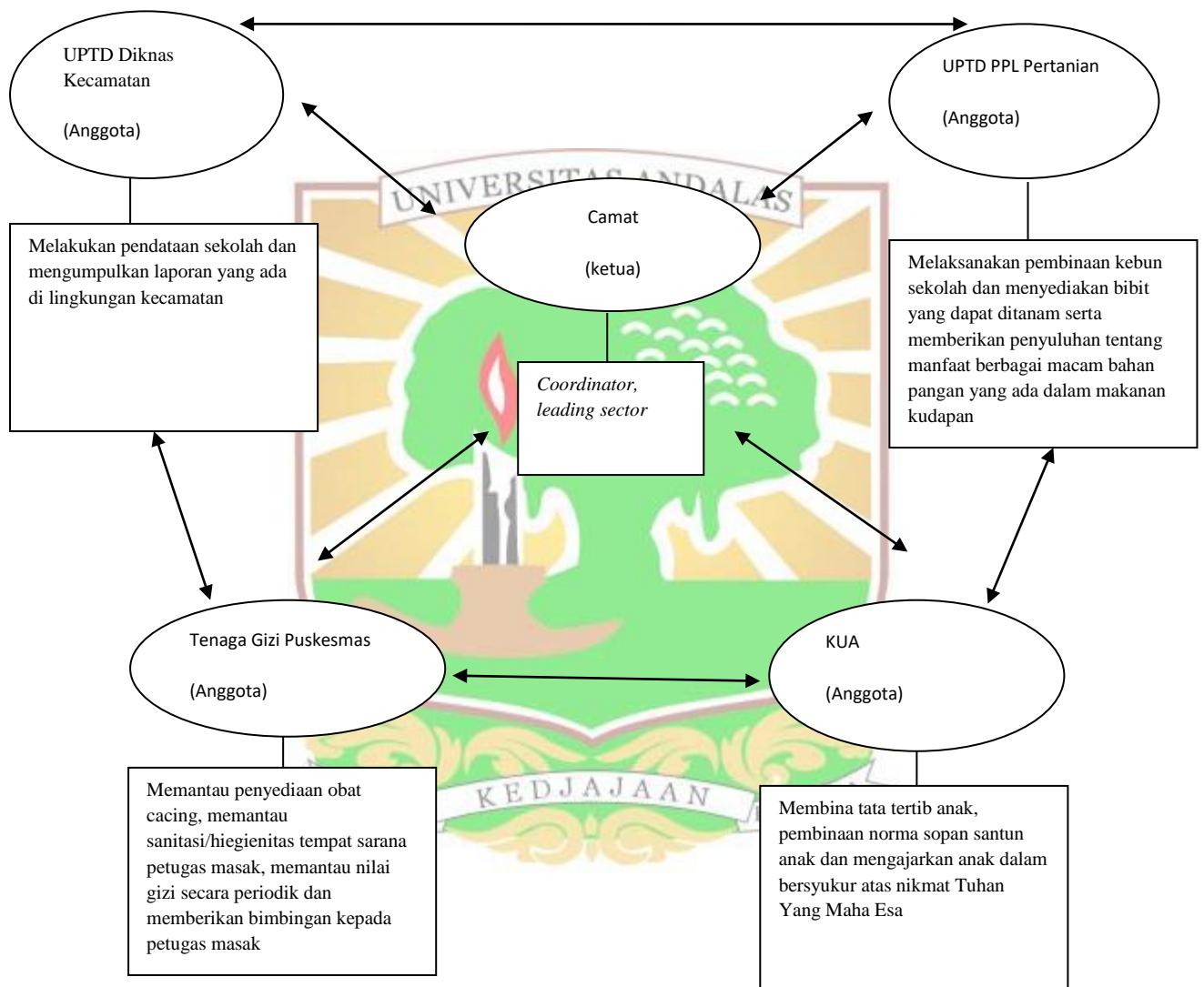
Bagan 1.1
Alur Koordinasi Beserta Tupoksi Panitia Pelaksana Program PMT-AS Tingkat Kota di Kota Padang



Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Bagan 1.2

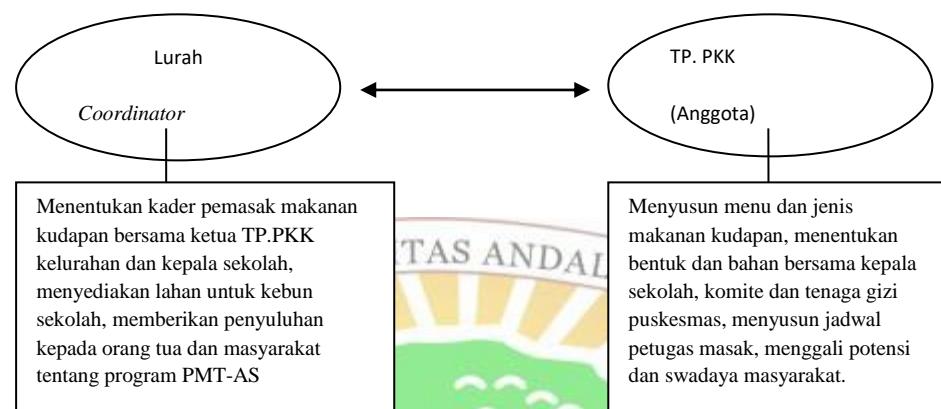
Alur Koordinasi Beserta Tupoksi Panitia Pelaksana Program PMT-AS Tingkat Kecamatan di Kota Padang



Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

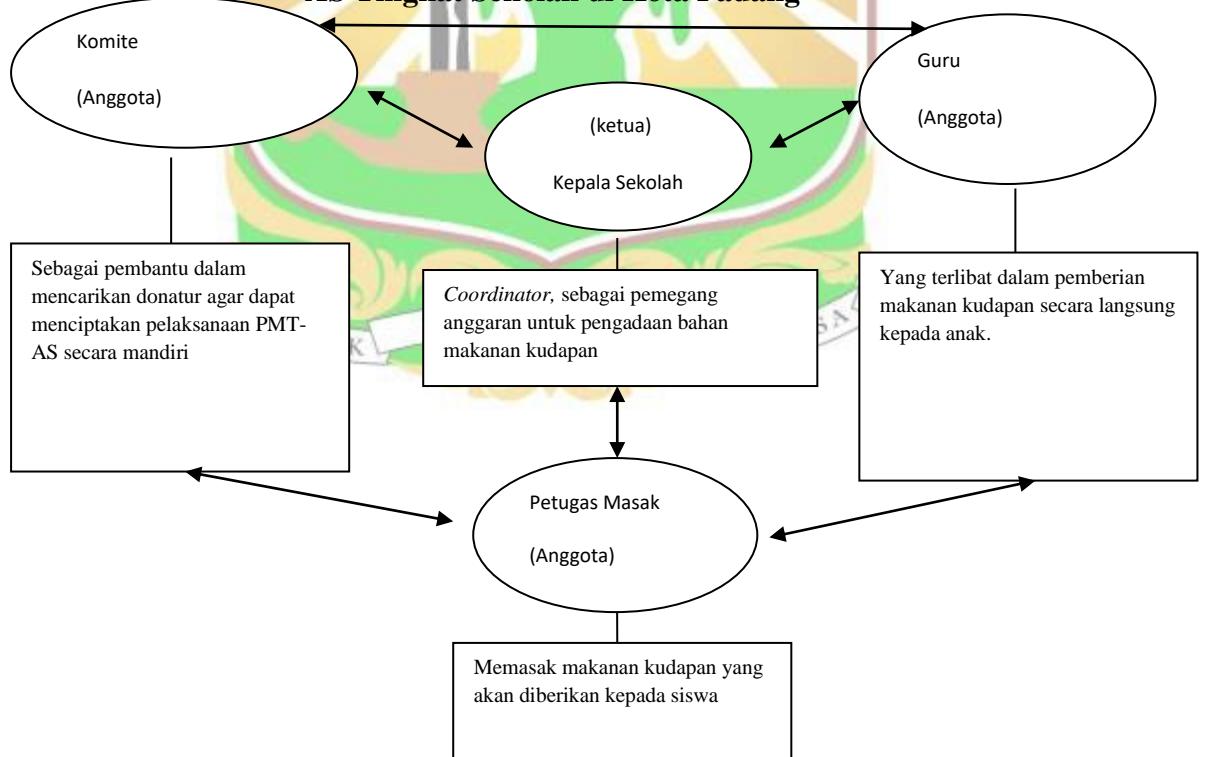
Bagan 1.3

Alur Koordinasi Beserta Tupoksi Panitia Pelaksana Program PMT-AS Tingkat Kelurahan di Kota Padang



Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Bagan 1.4
Alur Koordinasi Beserta Tupoksi Panitia Pelaksana Program PMT-AS Tingkat Sekolah di Kota Padang



Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2018

Sebagai program terpadu yang melibatkan berbagai instansi terkait diperlukannya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan PMT-AS ini. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan daripada bagian-bagian itu selesai pada waktunya sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usaha-usaha secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan. Koordinasi menempati peran penting agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan dapat mensingkronkan keseluruhan tujuan dan kepentingan bersama.¹² Namun pada saat melakukan pra-penelitian ada beberapa fakta yang peneliti temukan di lapangan terkait koordinasi dalam pelaksanaan PMT-AS.

Fakta yang peneliti temui di lapangan adalah anggota tim teknis pada panitia pelaksana kegiatan tingkat kota yang seharusnya berdasarkan SK Walikota Padang No 66 Tahun 2016 melaksanakan rapat secara berkala minimal 3 kali dalam setahun namun tidak terlaksana sebagaimana mestinya, anggota tim teknis hanya melakukan rapat sekali pada awal tahun saja. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan DP3AP2KB selaku koordinator tim teknis.¹³

“ Pada tahun 2017 ini kami hanya melakukan rapat sekali saja yaitu rapat kerja pada awal tahun saja, ya...program PMT-AS ini kan merupakan program yang diselenggarakan tiap tahun, jadi saya rasa masing-masing dari anggota tim teknis sudah paham dengan tugas nya masing-masing, jadi kalo rapat-rapat itu kami memang jarang”

Rapat koordinasi merupakan suatu bagian penting dalam mencapai koordinasi yang efektif. Dalam hal ini aturan dan prosedur yang digunakan oleh

¹²Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu administrasi dan Manajemen, Haji mas agung, Jakarta, 2011, Hlm. 88.

¹³Hasil wawancara dengan Kasi Kesehatan dasar dan Kesejahteraan selaku koordinator teknis panitia pelaksana PMT-AS di Kota Padang.

tim pelaksana di tingkat kota yaitu pada Surat Keputusan Walikota Padang No 66 Tahun 2016 dijelaskan bahwa rapat harus dilakukan secara berkala minimal 3 kali dalam setahun. Hal ini penting mengingat koordinasi harus berjalan secara terus menerus mulai dari perencanaan hingga tahap akhir yaitu evaluasi. Dengan adanya rapat maka infomasi keputusan dari masing-masing pihak akan mengalir cepat kesemua peserta rapat koordinasi sehingga akan mempermudah dalam proses koordinasi yang dilakukan dan juga dengan dijalankannya aturan-aturan dan prosedur tersebut dapat mempermudah dalam menangani kejadian-kejadian yang terjadi dan hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk tindakan kedepannya sehingga menjadi peralatan yang efisien dalam koordinasi.

Dalam pelaksanaan PMT-AS ini ada beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh DP3AP2KB untuk sekolah sasaran yang berhak mendapatkan program PMT-AS di Kota Padang. Berikut peneliti lampirkan tabel 1.6 kriteria sekolah sasaran PMT-AS yang sudah ditetapkan oleh DP3AP2KB yaitu :

Tabel 1.6
Kriteria Sekolah Sasaran Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kota Padang

No	Kriteria	Kota Padang
1	Sekolah Dasar (SD)	SD di daerah yang tertinggal dan terpencil
		SD di daerah miskin dari keluarga KS/KS1
		SD dengan tingginya persentase anak yang terhambat pertumbuhan fisiknya
2	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	MI di daerah yang tertinggal dan terpencil
		MI di daerah miskin dari keluarga KS/KS1
		MI dengan tingginya persentase anak yang terhambat pertumbuhan fisiknya

Sumber data : Data Olahan Peneliti tahun 2018

Pemilihan sekolah sesuai kriteria tersebut pendataannya dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang untuk Sekolah Dasar , dan Kementerian Agama

Kota Padang untuk Madrasah Ibtidaiyah. Dalam pemilihan kriteria sekolah sasaran Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Padang juga dibantu oleh DP3AP2KB dengan memberikan beberapa referensi berupa laporan bank data siswa yang diperoleh dari beberapa sekolah yang secara langsung meminta kepada DP3AP2KB untuk memberikan bantuan program PMT-AS kepada sekolahnya.

Berikut peneliti lampirkan tabel 1.7 tentang sekolah sasaran penerima Program PMTAS di Kota Padang :

Tabel 1.7

Sekolah Sasaran Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah di Kota Padang

No	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA SEKOLAH
1	Pauh	Limau Manis Koto Lua Binuang Kp Dalam Balai Gadang Pasia Jambak Kuranji	SD Negeri 17 MIN Koto Lua SD Negeri 03 SD Negeri 21 SD Negeri 06 SD Negeri 34 SD Negeri 35 SD Negeri 38
2	Koto Tangah		SD Negeri 11 SD Negeri 13 SD Negeri 23 SD Negeri 11 SD Negeri 17
3	Kuranji		
4	Bungus Tl Kabung	Bungus Timur Sei Pisang	
5	Lubuk Begalung	Pegambiran Ampalu	
6	Nanggalo	Kurao Pagang Gurun Laweh	

Sumber : Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 18 Tahun 2017

Sebagaimana data pada tabel 1.7 penetapan sekolah dari tahun 2013-2017 adalah 13 sekolah, sekolah tersebut ditunjuk berdasarkan skala prioritas, tapi fakta yang peneliti temukan dilapangan adalah bahwa ada banyak Sekolah Dasar di Kota Padang yang membutuhkan program PMT-AS untuk diselenggarakan di sekolah mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya. Hal ini terbukti dari banyaknya data tentang permintaan sekolah-sekolah yang kurang mampu yang

diajukan kepada DP3AP2KB agar PMT-AS juga dapat dilaksanakan di sekolah mereka. (Hal ini dapat dilihat pada lampiran 4)

Pemerintah seharusnya melakukan pendataan pada skala prioritas namun tidak memilih secara tepat pada sasaran, hal ini terlihat pada saat peneliti melakukan pra penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa MIN Koto Lua yang terletak di Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh adalah salah satu sekolah yang dianggap sudah mampu melakukan PMT-AS secara mandiri, MIN Koto Lua juga merupakan satu-satunya sekolah di bawah Kementerian Agama yang juga mendapatkan bantuan program lain dari Kementerian Agama sehingga dianggap sudah mampu dan sepatutnya digantikan dengan sekolah dasar lain yang lebih membutuhkan. Hal ini juga dibenarkan oleh Kasi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan DP3AP2KB yang memiliki kedudukan selaku koordinator teknis, berikut wawancara peneliti:¹⁴

“MIN Koto Lua merupakan sekolah di bawah Kementerian Agama yang banyak mendapatkan bantuan dan juga program dari Kementerian Agama, MIN Koto Lua juga merupakan sekolah paling mandiri dan kaya pada saat ini”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti melihat bahwa dalam menentukan sekolah sasaran pelaksana kegiatan PMT-AS terjadi komunikasi yang kurang efektif secara horizontal yaitu antara Dinas Pendidikan Kota Padang dengan Kementerian Agama Kota Padang, padahal PMT-AS ini merupakan program dengan sasaran anak-anak sekolah yang berada di lingkungan keluarga ekonomi lemah sehingga pemilihan sekolah dinilai kurang tepat sasaran.

¹⁴ Ibid.

Atas dasar hal ini juga peneliti memilih MIN Koto Lua Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh sebagai salah satu sekolah sasaran yang menjadi fokus penelitian yang akan peneliti lakukan, karena penelitian yang peneliti lakukan adalah tentang pelaksanaan PMT-AS di Kota Padang maka peneliti mewakili target penelitian dengan melihat perbandingan antara pelaksanaan PMT-AS di SD yang paling kaya dengan SD yang paling miskin, maka sebagai perbandingannya peneliti memilih 1 Sekolah Dasar lagi yaitu sekolah yang ekonomi keluarga dari murid-muridnya paling miskin yaitu SDN 11 di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Tl Kabung. Dari 13 Sekolah Sasaran PMT-AS di Kota Padang, SDN 11 adalah Sekolah Dasar dengan keadaan yang paling memprihatinkan.¹⁵ Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN 11 Bungus Timur :¹⁶

“ SD Sasaran yang paling miskin adalah SDN 11 di Bungus Timur, hal ini juga kami ketahui dari informasi yang diberikan DP3AP2KB mereka menyampaikan hal itu kepada kami, hal ini memang benar karena 3 tahun yang lalu saja masih ada anak-anak ke sekolah yang tidak memakai seragam dan juga sepatu untuk ke sekolah, dan pada tahun 2016 saja lulusan murid kelas 6 hanya 3 orang dan yang melanjutkan ke SMP juga hanya 1 orang, 2 lainnya juga belum lancar membaca dan tidak melanjutkan pendidikan ke SMP”

Berdasarkan wawancara tersebut kepala sekolah membenarkan bahwa SDN 11 adalah SDN dengan keadaan ekonomi keluarga murid-murid yang masih memprihatinkan, dilihat pada tahun 2016, hanya ada 1 orang murid yang melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan SMP dan 2 lainnya putus sekolah dengan kata lain tidak ikut serta dalam program wajib belajar 9 tahun yang

¹⁵Ibid.

¹⁶Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 11 Bungus Timur selaku ketua tim pelaksana PMT-AS di SDN 11 Bungus Timur.

merupakan tujuan dari pelaksanaan PMT-AS ini dalam rangka menunjang program wajib belajar 9 tahun.

Jadi berdasarkan fakta dan temuan diatas peneliti menetapkan MIN Koto Lua Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh dan SDN 11 Bungus Timur Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Tl. Kabung sebagai target penelitian yang akan peniliti lakukan.

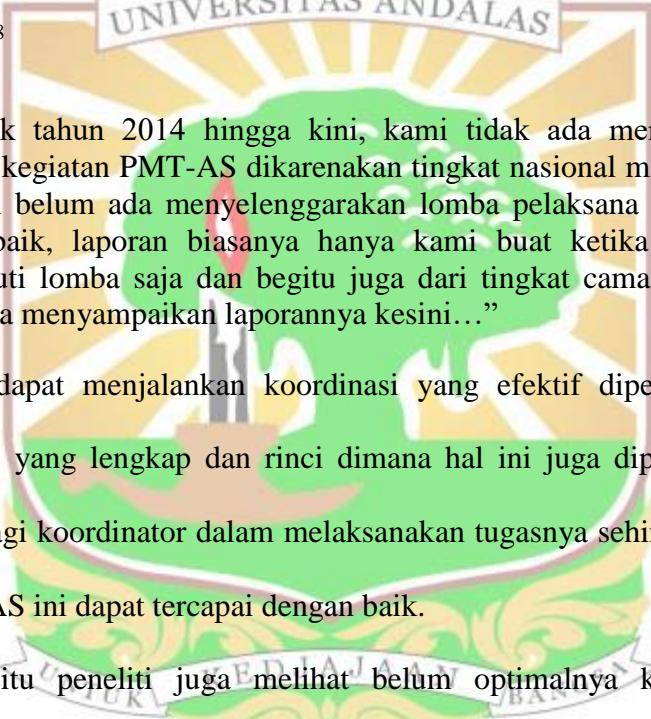
Untuk mencapai tujuan program PMT-AS diperlukan pengintegrasian kegiatan dari tingkat sekolah kepada kelurahan, kelurahan kepada kecamatan, dan kecamatan terhadap tingkat kota. Hal ini juga sudah dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Anak Sekolah Pasal 15 yang berbunyi :

1. Kepala desa melaporkan pelaksanaan PMT-AS kepada camat setiap bulan
2. Camat memberikan laporan pelaksanaan PMT-AS kepada bupati/walikota setiap dua bulan sekali.
3. Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan PMT-AS kepada gubernur setiap empat bulan sekali.
4. Gubernur melaporkan pelaksanaan PMT-AS kepada menteri dalam negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap enam bulan sekali.¹⁷

Hal ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program karena merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat perkembangan pelaksanaan program yang terjadi dilapangan sehingga pihak terkait dapat mengordinasikan dan menyelesaikan masalah secara bersama sehingga menimbulkan solusi untuk permasalah di lapangan.

¹⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri, *Loc.Cit.*

Namun fenomena yang terjadi di lapangan adalah pihak sekolah, kelurahan, kecamatan dan masing-masing anggota tim teknis tidak pernah melaporkan kegiatannya dalam bentuk laporan kepada pihak kota dan pihak kota juga tidak menyerahkan laporan kepada provinsi kecuali jika akan diadakan lomba pelaksanaan PMT-AS terbaik dalam tingkat kota, provinsi, maupun nasional. Hal ini juga disebutkan pada saat wawancara peneliti dengan Kasi Hak Sipil Informasi dan Partisipasi DP3AP2KB selaku sekretariat tim koordinasi di Kota Padang.¹⁸



“...Sejak tahun 2014 hingga kini, kami tidak ada membuat laporan kegiatan PMT-AS dikarenakan tingkat nasional maupun provinsi belum ada menyelenggarakan lomba pelaksana PMT-AS terbaik, laporan biasanya hanya kami buat ketika akan mengikuti lomba saja dan begitu juga dari tingkat camat juga tidak ada menyampaikan laporannya kesini...”

Untuk dapat menjalankan koordinasi yang efektif diperlukan laporan-laporan tertulis yang lengkap dan rinci dimana hal ini juga diperlukan sebagai bahan acuan bagi koordinator dalam melaksanakan tugasnya sehingga tujuan dari program PMTAS ini dapat tercapai dengan baik.

Selain itu peneliti juga melihat belum optimalnya koordinasi yang dilakukan antara masing-masing anggota tim teknis, hal ini terlihat dari beberapa masalah yang terjadi di lapangan. Pada saat peneliti melakukan pra-penelitian di Kelurahan Bungus Timur, lurah disana tidak mengetahui tentang tupoksinya sebagai ketua tim di kelurahan dalam kegiatan PMT-AS ini, Lurah Bungus Timur juga sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi terkait pelaksanaan PMT-

¹⁸Hasil wawancara dengan Kasi Hak Sipil Informasi &Partisipasi DP3AP2KB selaku sekretariat tim pelaksana PMT-AS di Kota Padang.

AS ini dengan panitia pelaksana PMT-AS tingkat kelurahan lainnya. Sebagaimana wawancara peneliti dengan Lurah Bungus Timur Berikut :¹⁹

“ ...Kalau adik tidak datang kesini, bapak mungkin tidak akan tau bahwa ada peran lurah dalam pelaksanaan PMT-AS ini, selama ini kegiatan PMT-AS itu hanya sekolah saja yang menentukan semuanya, bapak tidak pernah terlibat dan dilibatkan, :

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Lurah Bungus Timur tersebut, lurah tidak mengetahui wewenang dan tanggung jawabnya dengan jelas. Lurah sama sekali tidak mengetahui tentang tupoksinya sebagai ketua tim pelaksana PMT-AS di tingkat kelurahan dan juga tidak pernah menjalankan fungsinya sebagai ketua tim dalam kepanitian PMT-AS, Lurah Bungus Timur ini tidak mengetahui tentang SK panitia pelaksana PMT-AS, padahal sebagaimana mestinya berdasarkan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh DP3AP2KB Lurah memiliki tupaksi dalam membentuk SK panitia di tingkat kelurahan, menentukan kader pemasak dengan ketua TP.PKK dan juga kepala sekolah, membantu kepala sekolah menyediakan lahan untuk kebun sekolah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang PMT-AS dan juga melakukan pengendalian, pengawasan serta pemantauan dan evaluasi.

Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Sekolah SDN 11 Kelurahan Bungus Timur selaku kepala sekolah dari SD yang menjadi sasaran PMT-AS, seperti wawancara peneliti berikut :²⁰

¹⁹Hasil wawancara dengan Lurah Bungus Timur selaku panitia pelaksana PMT-AS di Kelurahan Bungus Timur Kecamatan Bungus Tl Kabung Kota Padang.

²⁰Ibid.

“...Selama ini kami tidak pernah melakukan komunikasi dengan lurah, dalam kegiatan PMT-AS di tahun 2017 lurah tidak pernah terlibat dalam kegiatan PMT-AS, lurah juga tidak pernah melakukan pemantauan dan pengawasan.”

Kepala Sekolah SDN 11 membenarkan bahwa dalam kegiatan PMT-AS selama tahun 2017 tidak ada berkomunikasi dengan lurah dan membenarkan bahwa tidak adanya keterlibatan lurah baik itu pemantauan ataupun pengawasan dalam kegiatan PMT-AS ini.

Fenomena lain yang peneliti temukan di lapangan adalah seperti kurangnya kreatifitas kader dalam memvariasikan menu kudapan sehingga anak yang diberi PMTAS bosan dengan menu yang tidak ada variasinya dan ada beberapa anak yang bahkan tidak memakan kudapan karena merasa makanannya tidak enak atau karena mereka tidak menyukai bahan dalam pembuatannya. Bahkan beberapa dari anak-anak tersebut memberikan makan kudapan tersebut kepada keluarganya dirumah dimana hal ini menyalahi aturan karena sasaran program PMT-AS yaitu siswa SD itu sendiri. Hal ini juga disampaikan pada saat wawancara peneliti dengan Kasi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi DP3AP2KB Kota Padang.²¹

“Ada banyak anak-anak yang bosan dengan menu yang tidak bervariasi, kadang mereka membawa pulang makanan tersebut dan diberikan kepada adiknya, hal lainnya juga kadang siswa suka cenderung tidak menyukai makanan dengan menu sayuran padahal sayuran sangat bagus untuk kebutuhan gizi mereka”

²¹Hasil wawancara dengan Kasi Hak Sipil Informasi &Partisipasi DP3P2KB selaku sekretariat tim pelaksana PMT-AS di Kota Padang.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Sekolah MIN Koto Lua selaku ketua tim pelaksana PMT-AS di tingkat sekolah sasaran PMT-AS.²²

“...Anak-anak cenderung tidak menyukai makanan spesifik daerah seperti lapek, padahal kami didorong untuk memberikan makanan-makanan spesifik daerah agar juga dapat memajukan ekonomi masyarakat sekitar karena bahan dasar dalam pembuatannya mudah didapat dari hasil pertanian masyarakat sekitar, namun anak-anak masih cenderung mengeluh, mereka akan sangat senang jika diberi makanan dengan bahan coklat, keju atau susu”.

Jika dilihat dari hasil wawancara dengan Kasi Hak Sipil dan Informasi dan Kepala Sekolah MIN Koto Lua tersebut, peneliti menemukan bahwa ada beberapa masalah yang tidak terpecahkan dalam pelaksanaan PMT-AS di Kota Padang. Permasalahan-permasalahan seperti ini seharusnya dapat diatasi secara dini agar kejadian-kejadian tersebut tidak lagi terjadi dimasa yang akan datang. Maksudnya ketika ada masalah yang terjadi di lapangan maka seharusnya langsung dikoordinasikan dengan pihak terkait karena koordinasi itu tidak boleh kaku artinya selalu ada perubahan sesuai kondisi yang terjadi di lapangan.

Peneliti tertarik untuk memilih koordinasi sebagai fokus penelitian, dimana pada dasarnya koordinasi merupakan bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan program PMT-AS karena program PMT-AS merupakan program lintas sektoral yang melibatkan beberapa instansi terkait. Tanpa koordinasi individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi.²³

²²Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Min Koto Lua selaku ketua tim pelaksana PMT-AS di MIN Koto Lua.

²³Hani Handoko, Manajemen, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm. 195.

Berpedoman dari fenomena yang peneliti jelaskan tersebut terhadap pelaksanaan PMT-AS yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai sektor, yaitu dari tingkat kota, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan dan tingkat sekolah sehingga berdasarkan hierarki tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang ada pada latar belakang dan bagaimana permasalahan yang terjadi maka peneliti merumuskan permasalahannya yakni : Bagaimana Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kota Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian dengan judul Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kota Padang yang peneliti lakukan yaitu mendeskripsikan Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan yang sifatnya praktis kepada mahasiswa Administrasi Publik tentang Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kota Padang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti selanjutnya, yang melakukan penelitian pada bidang yang ada kaitannya dengan Koordinasi Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat kepada pemerintah baik pihak yang berwenang terhadap Pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan Anak sekolah (PMTAS) di Kota Padang.

